

**PERAN BAWASLU JAKARTA PUSAT DALAM MENGAWASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DIRUANG
PUBLIK: STUDI KASUS PENGAWASAN PEMASANGAN BANNER
PEMILU 2024 DI JAKARTA PUSAT**

DIENA MOECHTAR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat dalam mengawasi dan menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024, khususnya di ruang-ruang publik. Dalam konteks pemilu sebagai perwujudan demokrasi, keberadaan APK memiliki fungsi penting sebagai sarana komunikasi politik, namun juga berpotensi melanggar estetika dan tata ruang kota jika tidak sesuai aturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Politik Tata Ruang Henry Lefebvre yang mencakup empat aspek: pembuatan ruang, pemanfaatan ruang, hak atas ruang, dan pengasingan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Jakarta Pusat telah menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban melalui koordinasi dengan Satpol PP, Kesbangpol, dan Panwascam. Penertiban dilakukan terhadap ribuan APK yang melanggar aturan pemasangan, seperti di trotoar, jembatan penyeberangan, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran peserta pemilu terhadap regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bawaslu Jakarta Pusat cukup strategis dalam menjaga keteraturan ruang publik dan kualitas demokrasi, namun perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi, koordinasi, dan penegakan hukum. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam pengawasan pemilu dan pengelolaan ruang publik yang demokratis.

Kata kunci: Bawaslu, Alat Peraga Kampanye (APK), Pemilu 2024, Politik Tata Ruang, Jakarta Pusat.

**THE ROLE OF THE CENTRAL JAKARTA ELECTION SUPERVISORY
AGENCY IN MONITORING THE INSTALLATION OF CAMPAIGN
MATERIALS IN PUBLIC SPACES: A CASE STUDY OF THE
MONITORING OF THE INSTALLATION OF 2024 ELECTION
BANNERS IN CENTRAL JAKARTA**

DIENA MOECHTAR

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Central Jakarta in monitoring and regulating the installation of Campaign Props (Alat Peraga Kampanye/APK) in public spaces during the 2024 General Election. In the democratic process, campaign tools are vital for political communication, but their misuse may harm urban aesthetics and violate spatial regulations. This research uses a descriptive qualitative method, applying Henry Lefebvre's Theory of the Production of Space, which includes four aspects: the production of space, the use of space, the right to space, and the exclusion from space. The findings indicate that Bawaslu Central Jakarta has actively conducted supervision and enforcement by coordinating with Satpol PP, Kesbangpol, and district-level Panwascam. Thousands of APKs violating campaign regulations such as those installed on sidewalks, pedestrian bridges, places of worship, and government facilities were removed. However, challenges persist, including limited human resources and low compliance from candidates and political parties. This study concludes that Bawaslu Central Jakarta plays a strategic role in safeguarding public spaces and ensuring a democratic electoral process, yet requires improvement in public education, institutional coordination, and law enforcement. The research contributes to political science, particularly in the areas of electoral supervision and democratic urban space governance.

Keywords: Bawaslu, Campaign Props (APK), 2024 General Election, Spatial Politics, Central Jakarta.